



**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

TESIS

**PARMIN
1320922046**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

PARMIN

1320922046

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Parmin
NRP : 1320922046
Tanggal : 16 Desember 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Desember 2015

Yang Menyatakan,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parmin
NRP : 1320922046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan Di
Pengadilan Niaga**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2015

Yang menyatakan,


Parmin

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Parmin

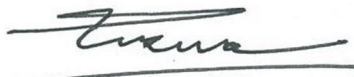
NRP : 1320922046

Program : Pasca Sarjana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara
Kepailitan Di Pengadilan Niaga

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



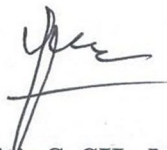
Dr. Erna Widjajati, SH, MH

Ketua Penguji



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, MHum

Penguji Ahli



Prof. Dr. Jeane Neltie S, SH., MH., APU.

Pembimbing I



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Pembimbing II



Dr. Iwan Kresna Setiadi, S.E, M.M

Direktur



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Ketua Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Desember 2015

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA

PARMIN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum acara dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang selama ini berlangsung jika dikaitkan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan. Dan untuk mengetahui masalah dalam putusan Nomor 82/Pailit/2001/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 49/Pailit/2001/PN Niaga Jkt. Pst.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian. Dasar dari perjanjian kredit menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu masing-masing pihak bebas mengadakan perjanjian apapun sebatas tidak melanggar ketertiban umum maupun kepatutan, dan para pihak tunduk dan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, melalui penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang diterapkan dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan dan serta mengkaitkan dengan peraturan lain yang relevan.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit mengatur perihal Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam memutus suatu permohonan pernyataan pailit tanpa hadirnya salah satu pihak dalam persidangan (verstek) yang dalam hal ini adalah pihak debitor termohon pailit, namun pada prakteknya selama ini Pengadilan Niaga sudah beberapa kali memeriksa dan memutus perkara kepailitan tanpa hadirnya pihak debitor termohon pailit dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang Kepailitan 2004, yakni Pasal 299 yang menyatakan bahwa, "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata." Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit tidak berarti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak kreditor termohon pailit pasti dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk pemeriksaan perkara, majelis hakim tetap akan menerapkan asas pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) j.o. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004. Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan perkara permohonan pernyataan pailit juga tidak secara otomatis diartikan bahwa pihak debitor termohon pailit tidak mampu membayar utangnya atau mengakui apa yang didalilkan oleh pihak kreditor pemohon pailit dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukannya.

Saran yang disampaikan adalah Sebaiknya Undang-Undang Kepailitan mengatur secara tegas mengenai hukum acara pemeriksaan perkara kepailitan yang terkait erat dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit di persidangan, sehingga bagi majelis hakim tidak ada lagi keragu-raguan untuk memutus suatu perkara kepailitan secara verstek.

Kata Kunci : putusan verstek

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE DECISIONS Verstek IN BANKRUPTCY CASE IN COURT OF COMMERCE

Parmin

Abstract

This study was conducted to determine the procedural law in the case of bankruptcy in the Commercial Court which have occurred if it is associated with the absence of the defendant bankrupt debtors in the trial. And to identify problems in decision No. 82 / Bankrupt / 2001 / PN Commerce Jkt.Pst and Decision No. 49 / Bankrupt / 2001 / PN Commerce Jkt. Pst. The theory used in this research is the theory of agreement. The basis of the loan agreement pursuant to Article 1320 and 1338 of the Civil Code is the principle of freedom of contract, ie each party free to enter into any agreement to the extent not violate public order and decency, and the parties are subject to and bound by the treaty. The method used is the juridical-normative, through a study of the level of synchronization of the laws applied in this case the Bankruptcy Act and as well as linking with other relevant regulations. Results of this study was formulated that although the Bankruptcy Act does not explicitly set about the judges at the Commercial Court in deciding an application for a declaration of bankruptcy without the presence of one of the parties in the hearing (verstek) which in this case is the debtor defendant bankrupt, but in practice during the Commercial Court has several times to examine and decide the case without the presence of bankruptcy debtors bankrupt defendant in the trial. This is in line with the provisions of Iain forth in the Bankruptcy Act, 2004, namely Article 299 which states that, "Except as otherwise provided in this Act, the law applicable is the Civil Procedure Code." Absence debtors insolvent defendant does not mean that the application for a declaration of bankruptcy filed for bankruptcy the creditors defendant is granted by the judge. For the examination of the case, the judge will apply the burden of proof remains modest by Article 2 (1) j.o. Article 8 paragraph (4) Bankruptcy Act of 2004. The absence of the debtor bankrupt defendant in the trial court declaration of bankruptcy petition does not automatically mean that the defendant bankrupt debtor is unable to pay its debts or acknowledge what is argued by the applicant creditor in the bankruptcy petition statement bankruptcy filing. Preferably suggestions submitted is the Bankruptcy Act expressly regulate the procedural law of the bankruptcy case investigation is closely linked to the absence of the defendant bankrupt debtors in court, so the judge no more hesitations to decide a case in verstek bankruptcy.

Keywords: decision verstek

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan kehadiratNya atas berkat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

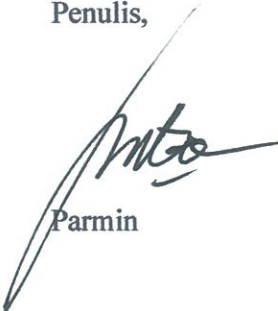
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N selaku Pembimbing II
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
7. Rekan-rekan se-angkatan yang telah memotivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak yang sempat membacanya, serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

Jakarta, 16 Desember 2015

Penulis,



Parmin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
I.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN	18
II.1 Tinjauan Umum Kepailitan.....	18
II.2 Hukum Acara Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	36
II.3 Ketidakhadiran Pihak Debitor Termohon Pailit Dalam Pelaksanaan Di Pengadilan Niaga.....	60
II.4 Peluang Debitor Menghindari Perdamaian dan PKPU.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKHADIRAN PIHAK DEBITOR TERMOHON PAILIT DI PERSIDANGAN.....	67
IV.1 Abstraksi Perkara PT. Tempo Utama Finance Melawan PT. Alam Multi Sari, PT. Alam Raya Sewing Machine & Electronic Industrie, Lim Sin Seng (Putusan No. 82/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	67
IV.2 Abstraksi Perkara BPN Paribas Melawan PT. Aempe Pluit Bataco Raya (Putusan No. 49/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan No. 047/K/N/2001 jo Putusan No. 04/K/N/2002.....	72
IV.3 Abstraksi Perkara PT. Metrocorp Melawan PT. Bank Internasional Indonesia (Putusan No. 01/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt. Pst jo. Putusan No. 16/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	90
IV.4 Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Dalam Kepailitan.....	94
BAB V PENUTUP.....	99
V.1 Kesimpulan.....	99
V.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
RIWAYAT HIDUP	